

VIRTUE ETHICS: PENTINGNYA ETIKA DALAM KOMUNIKASI PUBLIK PADA ORGANISASI PEMERINTAHAN (STUDI KASUS PADA KEGAGALAN KOMUNIKASI PUBLIK HASAN NASBI, KEPALA KANTOR KOMUNIKASI KEPRESIDENAN)

Aprilla Suriesto Madaun

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Indonesia
april@usd.ac.id

Abstrak

Komunikasi publik yang efektif dan beretika adalah landasan penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya penerapan *virtue ethics* dalam komunikasi publik pada organisasi pemerintahan, dengan fokus pada dampak kegagalan komunikasi terhadap kredibilitas institusi. Melalui studi kasus pada kontroversi komunikasi publik yang melibatkan Hasan Hasbi selaku Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, penelitian ini menganalisis bagaimana pelanggaran prinsip-prinsip etika komunikasi dapat berpengaruh terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa studi kasus dan analisis data melalui *literature review* terhadap teori *virtue ethics*, komunikasi publik, dan tata kelola pemerintahan. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber akademik, laporan media, dan dokumen resmi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *virtue ethics* dalam komunikasi publik sangat penting posisinya untuk membangun dan mempertahankan legitimasi pemerintah. Kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip etika komunikasi, seperti terlihat dalam kasus yang diteliti, dapat menggerus kepercayaan publik, menurunkan kredibilitas institusi, dan mengganggu efektivitas kebijakan pemerintah. Penelitian ini menekankan perlunya *framework* etika komunikasi yang jelas dalam organisasi pemerintahan untuk mencegah terulangnya kegagalan serupa.

Kata kunci: *virtue ethics*, komunikasi publik, tata kelola, organisasi, etika

VIRTUE ETHICS: THE IMPORTANCE OF ETHICS IN PUBLIC COMMUNICATION WITHIN GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS (A CASE STUDY ON THE PUBLIC COMMUNICATION FAILURE OF HASAN NASBI, HEAD OF THE PRESIDENTIAL COMMUNICATION OFFICE)

Aprilla Suriesto Madaun

University of Sanata Dharma, Indonesia
april@usd.ac.id

Abstract

Effective and ethical public communication constitutes a fundamental foundation for good governance. This study aims to analyze the significance of implementing virtue ethics in public communication within governmental organizations, with a focus on the impact of communication failures on institutional credibility. Through a case study examining the public communication controversy involving Hasan Hasbi as Head of the Presidential Communication Office, this research analyzes how violations of communication ethics principles can influence public trust in government. This study employs a qualitative approach with case study data collection methods and data analysis through literature review of virtue ethics theory, public communication, and governance. Secondary data were obtained from various academic sources, media reports, and official government documents. The findings

indicate that the implementation of virtue ethics in public communication is critically important for building and maintaining government legitimacy. Failures in applying communication ethics principles, as demonstrated in the examined case, can erode public trust, diminish institutional credibility, and disrupt the effectiveness of government policies. This study emphasizes the necessity of a clear communication ethics framework within governmental organizations to prevent the recurrence of similar failures.

Keywords: virtue ethics, public communication, governance, organization, ethics

1. Pendahuluan

Komunikasi publik adalah unsur mendasar dalam tata kelola pemerintahan yang berlandaskan demokrasi. Dalam negara demokrasi, kepercayaan publik sangat vital peranannya karena kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Kepercayaan publik ini dapat dibangun melalui komunikasi yang efektif, di mana pemerintah menyampaikan kebijakan dengan jelas agar dapat mempertahankan legitimasi institusional. Dengan demikian, komunikasi publik perlu dilandasi oleh prinsip-prinsip etika yang kuat. Jika tidak, maka akan berdampak negatif pada kredibilitas pemerintah dan mengikis kepercayaan masyarakat.

Dengan melihat dinamika di Indonesia dewasa ini, peran komunikasi publik semakin strategis sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang mendukung kecepatan penyebaran informasi. Menurut Putra (2024), sebagai negara demokrasi yang sedang berkembang, Indonesia telah mengalami transformasi penting dalam hubungan antara media dan politik. Lanskap media politik di Indonesia merupakan cerminan dari dinamika politik negara yang beragam dan terus berkembang. Efeknya adalah setiap pernyataan atau sikap politik yang diambil oleh pejabat pemerintah, terlebih yang berwenang dalam komunikasi publik, dapat dengan cepat menjadi viral dan berpengaruh luas terhadap opini publik.

Terkait komunikasi publik pejabat pemerintah, terdapat sebuah kasus yang memicu kontroversi baru-baru ini. Kasus ini melibatkan Hasan Nasbi selaku Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Seperti yang dituliskan oleh Wijayaatmaja (2025) di Harian Media Indonesia, kasus ini berawal dari tanggapan Hasan terhadap insiden teror berupa pengiriman kepala babi ke kantor redaksi Tempo. Hasan menanggapi teror tersebut dengan berkata, “Ya sudah, dimasak saja”. Tanggapannya tersebut dinilai publik sebagai respon yang tidak etis. Kontroversi ini akhirnya berujung pada pengunduran dirinya dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan pada April 2025.

Menurut peneliti, kasus ini menjadi relevan untuk dikaji dari perspektif etika dalam tata kelola organisasi. *Virtue ethics* atau etika keutamaan, sebuah pendekatan etika yang dikembangkan oleh Aristoteles yang menekankan pada karakter dan keutamaan moral individu, akan menjadi dasar dalam kajian ini. Peneliti menilai etika merupakan elemen yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia pada umumnya, dan manajemen organisasi pada khususnya. Dalam konteks komunikasi publik, *virtue ethics* dapat memberikan kerangka teoritis untuk memahami bagaimana karakter dan keutamaan moral seseorang dapat mempengaruhi efektivitas dan dampak komunikasinya.

Permasalahan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *virtue ethics* dalam komunikasi publik dapat berperan dalam mengembangkan tata kelola organisasi pemerintahan? Dan bagaimana kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap organisasi pemerintahan? Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran penting penerapan *virtue ethics* dalam komunikasi publik organisasi pemerintahan, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan komunikasi publik dalam kasus Hasan Nasbi, dan merekomendasikan pengembangan *framework* etika komunikasi yang lebih baik dalam organisasi pemerintahan.

2. Tinjauan Pustaka

Virtue Ethics dalam Perspektif Aristoteles

Virtue ethics atau etika keutamaan merupakan salah satu dari tiga pendekatan utama dalam filsafat moral, bersama dengan deontologi dan konsekuensialisme (Hursthouse & Pettigrove, 2023). Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh Aristoteles dalam karyanya *Nicomachean Ethics* dan kembali mendapat perhatian dalam diskusi etika kontemporer (MacIntyre, 2007).

Menurut Aristoteles (2009), *virtue* (keutamaan) adalah disposisi karakter yang memungkinkan seseorang untuk bertindak secara tepat dalam keadaan tertentu. Keutamaan bukanlah sesuatu yang muncul secara alamiah, melainkan diusahakan melalui praktek dan kebiasaan yang konsisten. Aristoteles membagi keutamaan menjadi dua jenis: keutamaan intelektual dan keutamaan moral (Sherman, 1989). Bagi Aristoteles (2009), keutamaan intelektual terdiri dari lima aspek: akal budi (*nous*), kebijaksanaan teoritis (*sophia*), pengetahuan ilmiah (*episteme*), kebijaksanaan praktis (*phronesis*), dan keterampilan (*techne*). Sementara keutamaan moral meliputi berbagai keutamaan seperti empati, keberanian, kejujuran, keadilan, dan kesederhanaan (Foot, 2001).

Dalam rangka komunikasi publik, konsep *phronesis* atau kebijaksanaan praktis menjadi sangat relevan. *Phronesis* merupakan kemampuan untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip moral dalam situasi nyata dan mengambil keputusan yang tepat dalam konteks tertentu (Sherman, 1989). Seseorang yang mempunyai *phronesis* akan mampu menyampaikan pesan dengan cara yang tepat, pada saat yang tepat, dan kepada pendengar yang tepat.

Komunikasi Publik dalam Tata Kelola Organisasi Pemerintahan

Komunikasi publik dalam konteks tata kelola organisasi pemerintahan dapat diartikan sebagai mekanisme pertukaran informasi, ide, dan nilai-nilai antara pemerintah dan masyarakat yang bertujuan menciptakan pemahaman bersama dan membangun kepercayaan publik (Lee, 2008). Komunikasi publik yang efektif mempunyai beberapa ciri utama: transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan inklusivitas (Grunig & Hunt, 1984). Karakteristik-karakteristik ini harus senantiasa diperhatikan oleh para juru bicara pemerintahan dalam menyampaikan informasi agar kepercayaan publik senantiasa terjaga.

Di era digital sekarang ini, komunikasi publik berhadapan dengan tantangan baru berupa penyampaian informasi yang serba cepat sehingga terdapat potensi misinformasi (Tench & Yeomans, 2009). Media sosial dan platform digital lainnya menjadi pendukung utama dalam penyebaran informasi dengan kecepatan tinggi ini. Namun, karena kecepatan tersebut, risiko terjadinya kesalahpahaman atau interpretasi yang keliru juga mengalami peningkatan. Dengan kondisi seperti ini, peran juru bicara dalam pemerintahan menjadi semakin strategis karena mereka berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat (Broom & Sha, 2013). Mereka tidak hanya bertugas menyalurkan informasi, tetapi juga membentuk persepsi publik terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah.

Kredibilitas dan Legitimasi dalam Komunikasi Pemerintahan

Kredibilitas adalah aset yang sangat penting dan berharga bagi lembaga pemerintahan (Kriyantono, 2015). Kredibilitas tercipta jika antara perkataan dan tindakan selalu konsisten, penyampaian informasi dilakukan secara transparan, dan kebutuhan masyarakat direspon dengan cepat. Pada saat kredibilitas mengalami degradasi, efeknya dapat meluas ke aspek lain di pemerintahan. Ketika kredibilitas runtuh, usaha untuk membangunnya kembali akan lebih sulit.

Legitimasi pemerintahan, di sisi lain, terkait dengan pengakuan masyarakat terhadap wewenang dan hak pemerintah untuk mengatur mereka. Legitimasi dapat didapatkan dengan berbagai cara, salah satunya melalui komunikasi publik yang efektif dan etis (Lee, 2008).

Komunikasi yang kurang efektif dan tidak etis dapat menggerus legitimasi yang dimiliki pemerintah dan mengurangi dukungan publik terhadap kebijakan yang diambil. Efeknya tentu saja akan berdampak pada efektivitas dan efisiensi program yang direncanakan oleh organisasi pemerintahan terkait.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada penemuan dan pemahaman mendalam tentang makna atau sifat dari suatu fenomena sosial, dengan menggunakan kata-kata dan bahasa (Sekaran & Bougie, 2016). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena komunikasi publik secara mendalam dari perspektif *virtue ethics*, yang membutuhkan analisis yang komprehensif terhadap konteks, makna, dan interpretasi dari berbagai pemangku kepentingan.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kasus dengan berfokus pada kasus Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Menurut Sekaran & Bougie (2016), studi kasus berfokus pada pengumpulan informasi tentang objek, peristiwa, atau aktivitas tertentu, seperti unit bisnis atau organisasi tertentu. Studi kasus dipilih karena metode ini memungkinkan penelitian yang mendalam terhadap fenomena tertentu dalam konteks kehidupan nyata. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder yang terdiri dari dokumen resmi pemerintah berupa pernyataan resmi, siaran pers, dan dokumen kebijakan terkait komunikasi publik. Selain itu, data juga didapatkan dari laporan media berupa berita, artikel, dan laporan investigasi dari berbagai media massa mengenai kasus yang diteliti. Literatur akademik berupa jurnal ilmiah, buku, dan publikasi akademik tentang *virtue ethics*, komunikasi publik, dan tata kelola pemerintahan dijadikan juga sebagai sumber data.

Analisis data dilakukan melalui *literature review* yang sistematis. *Literature review* dilakukan dengan memilih dokumen yang tersedia tentang topik, yang berisi informasi, ide, data, dan bukti yang ditulis dari sudut pandang tertentu untuk mengungkapkan pandangan tertentu tentang sifat topik dan bagaimana topik itu akan diselidiki (Sekaran & Bougie, 2016). Dalam penelitian ini, pertama-tama, peneliti mengidentifikasi dan menyeleksi sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Kedua, peneliti menganalisis isi dari berbagai sumber data untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola yang muncul. Ketiga, peneliti mensintesa temuan dari berbagai sumber tersebut dengan kerangka teoritis *virtue ethics* untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif. Terakhir, peneliti menginterpretasi temuan dalam konteks yang lebih luas dan memberikan penilaian kritis terhadap fenomena yang diteliti berupa analisa dampak dan *framework* perbaikan.

4. Hasil dan Pembahasan

Profil Kasus: Kontroversi Pernyataan Hasan Nasbi

Hasan Nasbi merupakan seorang konsultan politik yang ditetapkan sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan pada periode pemerintahan Prabowo Subianto. Sebelumnya, ia menjabat sebagai juru bicara tim kampanye Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 dan merupakan pendiri lembaga survei Cyrus Network (Buana, 2025). Kontroversi dimulai ketika Hasan Nasbi menanggapi insiden teror berupa pengiriman kepala babi ke kantor redaksi majalah Tempo. Tanggapannya dinilai publik sebagai respon yang tidak etis, yang kemudian memicu kritik luas dari berbagai kalangan, termasuk jurnalis, aktivis, dan masyarakat umum (Ayu, 2025).

Kritik yang dilayangkan terhadap Hasan Nasbi tidak hanya menyoroti substansi pernyataannya, tetapi juga waktu dan cara penyampaiannya yang dianggap kurang tepat. Sebagai seorang pejabat yang menduduki posisi strategis dalam komunikasi publik, ia dinilai seharusnya dapat menunjukkan empati dan tindakan yang beretika terhadap isu-isu yang

berkaitan dengan kebebasan pers dan keamanan jurnalis. Tekanan publik yang terus meningkat akhirnya mendorongnya untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada 29 April 2025 (Harbowo & Susilo, 2025). Dalam surat pengunduran dirinya, ia mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil untuk menjamin kebaikan komunikasi pemerintah di masa yang akan datang.

Analisis Virtue Ethics dalam Kasus Hasan Nasbi

a. Kegagalan dalam Keutamaan Intelektual

Dalam perspektif *virtue ethics*, kesalahan utama Hasan Nasbi terletak pada lemahnya *phronesis* atau kebijaksanaan praktis. *Phronesis* terkait dengan kemampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip moral dalam situasi konkret dan mengambil sebuah keputusan yang tepat berdasarkan konteks yang ada. Menurut Aristoteles (2009), seseorang dengan kebijaksanaan praktis dapat melihat dengan jelas apa yang baik untuk dirinya dan bagi manusia pada umumnya. Aristoteles bahkan memberikan contoh bahwa orang yang pandai mengelola rumah tangga dan negara dapat dikatakan memiliki kebijaksanaan praktis.

Dalam kasus ini, Hasan Nasbi gagal menunjukkan kebijaksanaan praktis dalam beberapa aspek. Ia gagal dalam mempertimbangkan dengan baik konteks teror terhadap jurnalis sebagai ancaman serius terhadap kebebasan pers. Terkait hal ini, ia tidak menunjukkan sensitifitas terhadap situasi yang sedang terjadi. Ketika ia menyampaikan tanggapannya, ia juga tidak mempertimbangkan suasana emosional publik yang sedang prihatin terhadap insiden tersebut. Selain itu, pilihan kata yang ia gunakan, “*Sudah, dimasak saja*”, juga terkesan meremehkan atau tidak empatik terhadap korban teror.

b. Kurangnya Keutamaan Moral

Aristoteles (2009) menekankan pentingnya keutamaan moral seperti empati dan keadilan dalam interaksi sosial. Baginya, keutamaan moral diperoleh melalui pengulangan tindakan yang sesuai. Artinya, keutamaan moral muncul sebagai hasil dari kebiasaan. Tidak satu pun keutamaan moral muncul dalam diri manusia secara alami, tetapi diadaptasi oleh alam untuk menerimanya, dan disempurnakan oleh kebiasaan. Dalam hal ini, manusia hanya bisa adil dengan melakukan tindakan-tindakan adil, bersikap tenang dengan melakukan tindakan-tindakan yang tenang, berani dengan melakukan tindakan-tindakan yang berani. Dengan demikian, untuk memiliki keutamaan seperti empati dan sikap adil, seseorang perlu membiasakan tindakan-tindakan yang mendukung terciptanya keutamaan yang dituju.

Dalam kasus Hasan Nasbi, kurangnya empati terhadap situasi yang dialami jurnalis dan media massa menjadi salah satu faktor utama yang memicu kontroversi. Empati dalam komunikasi publik bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang kemampuan untuk memahami perspektif orang lain dan merespons dengan cara yang tepat. Kegagalan dalam menunjukkan empati dapat merusak hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta mengurangi efektivitas komunikasi publik. Seyogyanya, setiap pejabat publik perlu senantiasa menunjukkan sikap empatik dalam tindakan yang dilakukan agar keutamaan moral tercipta secara otentik, bukan seolah-olah dibuat untuk kepentingan tertentu.

Dampak Kegagalan Komunikasi Publik terhadap Tata Kelola Organisasi

a. Erosi Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik adalah modal sosial yang sangat berharga bagi pemerintahan dan mengambil peran sebagai landasan legitimasi dan kohesi sosial (Prasetyo & Kriswibowo, 2022). Modal sosial, termasuk kepercayaan, berkontribusi signifikan terhadap efektivitas administrasi publik di era digital (Hatta & Suparman, 2025). Oleh karena itu, untuk membangun kepercayaan, pemerintah dapat memanfaatkan komunikasi dialogis melalui media

sosial agar tercipta iklim keterbukaan yang pasti berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan pada pemerintah.

Akan tetapi, jika tidak berhati-hati, kegagalan komunikasi publik dapat mengikis kepercayaan ini dengan cepat, terutama dalam era media sosial dimana informasi dapat menyebar dengan kecepatan tinggi. Dalam kasus Hasan Nasbi, kontroversi ini tidak hanya memengaruhi persepsi publik terhadap individu yang bersangkutan, tetapi juga terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola komunikasi publik secara keseluruhan. Hal ini dapat berdampak pada efektivitas kebijakan komunikasi pemerintah di masa depan.

b. Penurunan Kredibilitas Institusional

Kegagalan komunikasi publik tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga pada integritas institusi secara keseluruhan. Hal ini bisa dipahami karena persoalan ini tidak hanya terkait dengan kualitas moral seseorang, tetapi juga pada sistem yang tidak kondusif (Latifah et al., 2025). Dalam kasus Hasan Nasbi ini, kontroversi yang timbul berpotensi merusak citra Kantor Komunikasi Kepresidenan dan bahkan pemerintahan secara umum. Perlu diingat bahwa integritas institusional dibangun melalui konsistensi dalam penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi. Jadi, ketika pejabat publik gagal menunjukkan keutamaan moral yang diharapkan, hal ini dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi tersebut.

Kredibilitas institusional merupakan sesuatu yang sulit dibangun namun mudah hancur. Kegagalan komunikasi publik dapat menggerus kredibilitas institusi dan membutuhkan upaya ekstra untuk memulihkannya. Penurunan kredibilitas tidak hanya berdampak pada aspek komunikasi, tetapi juga dapat meluas ke aspek-aspek lain dari pemerintahan. Misalnya, masyarakat yang kehilangan kepercayaan terhadap komunikasi yang dilakukan pemerintah mungkin juga akan meragukan kebijakan dan program yang dilakukan oleh pemerintah.

c. Gangguan terhadap Efektivitas Kebijakan

Komunikasi publik yang efektif merupakan prasyarat untuk implementasi kebijakan yang berhasil. Perlu adanya suatu kesadaran bersama dari perumus dan pemangku kebijakan untuk menciptakan strategi komunikasi yang baik sebagai alat untuk mendukung implementasi kebijakan yang efektif (Rasyid et al., 2025). Ketika komunikasi publik terganggu akibat kontroversi, hal ini dapat berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah untuk menyampaikan pesan kebijakan dengan efektif. Dalam ranah yang lebih luas, persoalan dalam komunikasi publik dapat berpengaruh juga terhadap legitimasi pemerintahan dan dukungan publik terhadap agenda pembangunan nasional.

Kasus Hasan Nasbi semakin mempertegas banyak komunikasi pemerintah Indonesia saat ini memang buruk. Sebagian besar kritik yang muncul menyoroti kurangnya empati, transparansi, dan responsifitas dalam komunikasi pemerintah ketika menanggapi isu-isu publik. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada, Nyarwi Ahmad, menyoroti pola komunikasi politik yang dibangun oleh Staf Komunikasi Kepresidenan terlalu defensif dan argumentatif. Ia menilai gaya komunikasi Hasan Nasbi masih mirip dengan gaya komunikasi kampanye, padahal komunikasi di lingkungan kepresidenan seharusnya mengedepankan diplomasi publik dan strategi yang dapat merangkul semua pihak. Menurutnya hal ini bisa memunculkan sentimen negatif terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo (Rahmawati, 2025).

Framework Perbaikan Tata Kelola Organisasi yang Dibutuhkan

a. Pentingnya Pemahaman Konteks

Seorang komunikator publik wajib mempunyai pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial, budaya, dan politik di wilayah tempatnya bertugas. Pemahaman mendalam terhadap konteks sosial, budaya, dan politik adalah dasar utama dalam komunikasi publik yang

efektif. Dinamika masyarakat, nilai-nilai lokal, serta isu-isu sensitif yang dapat memengaruhi penerimaan pesan harus dipahami oleh seorang komunikator publik. Absennya pemahaman ini berpotensi membuat komunikasi menghadapi resistensi atau bahkan memicu kontroversi yang memperburuk citra organisasi. Pengetahuan konteks juga memungkinkan perumusan pesan yang lebih mengena dan dekat dengan situasi masyarakat. Dengan demikian, pemahaman konteks memperkuat legitimasi organisasi di mata publik.

Ada beragam cara yang bisa diusahakan untuk memahami konteks. Misalnya dengan melakukan pemetaan sosial dan budaya secara rutin sebelum menyusun pesan yang akan dikomunikasikan. Setiap organisasi publik juga bisa membentuk tim riset internal yang bertugas mengumpulkan informasi konteks lokal. Setelah itu, organisasi publik bisa melibatkan tokoh masyarakat atau komunitas dalam uji coba pesan publik. Pemahaman juga dapat diupayakan dengan memanfaatkan analisis media sosial untuk mengukur sensitivitas publik terhadap isu tertentu. Yang tidak kalah penting adalah dengan mengadakan forum diskusi rutin dengan segenap stakeholder untuk memperbarui wawasan tentang konteks social budaya, dan politik dimana organisasi publik berada.

b. Pentingnya Pelatihan Etika Komunikasi

Kasus Hasan Nasbi menunjukkan pentingnya pelatihan etika komunikasi bagi pejabat publik, khususnya mereka yang bertanggung jawab dalam komunikasi publik. Pelatihan etika komunikasi bukan sekadar soal keterampilan berbicara, tetapi menyangkut integritas, tanggung jawab moral, dan kemampuan menghindari manipulasi informasi. Studi terbaru menunjukkan bahwa mayoritas komunikator publik menghadapi dilema etis dalam praktik sehari-hari, khususnya di era digital (Andini et al., 2024). Oleh karena itu, pelatihan harus mencakup kode etik profesi, simulasi kasus nyata, serta pengembangan karakter. Retret atau sesi reflektif juga dapat memperkuat kesadaran moral pejabat publik. Oleh karena itu, hal ini juga seharusnya menjadi materi wajib dalam kegiatan ret-ret bagi para pejabat publik yang secara rutin dilaksanakan di awal masa jabatan di Magelang. Implementasi pelatihan ini akan mencegah kasus komunikasi publik yang kontraproduktif, seperti yang pernah terjadi pada tokoh-tokoh pejabat yang tidak menguasai etika komunikasi.

c. Kebutuhan akan Sistem Kontrol dan Evaluasi

Kontrol dan evaluasi sangat dibutuhkan untuk memastikan komunikasi publik sejalan dengan prinsip etika dan tujuan organisasi. Tanpa mekanisme ini, pelanggaran etika berpotensi terulang tanpa perbaikan yang nyata. Evaluasi harus mencakup audit komunikasi, masukan dari masyarakat, serta pemantauan internal atas setiap pesan publik. Studi menekankan pentingnya kode etik, mekanisme orientasi, serta sistem konsultasi internal dalam mendukung tata kelola komunikasi yang baik (Musaraj & Gerxhi, 2010). Selain itu, audit etika dapat menjadi alat untuk mengukur integritas organisasi publik dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Adapun langkah praktis yang mendukung hal ini adalah dengan membentuk unit pengawasan komunikasi yang independen dalam organisasi. Survei publik secara berkala perlu juga dilakukan untuk mengevaluasi persepsi masyarakat. Selain itu, organisasi publik perlu menerapkan sistem pelaporan anonim bagi pegawai yang menemukan pelanggaran etika. Organisasi publik perlu menerapkan indikator kinerja (KPI) komunikasi publik berbasis etika dalam penilaian pegawai. Terakhir, perlu adanya audit komunikasi tahunan untuk menilai kepatuhan terhadap kode etik setiap pejabat di organisasi publik.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *virtue ethics* dalam komunikasi publik adalah faktor krusial dalam membangun dan mempertahankan legitimasi pemerintahan. Kasus kontroversi yang melibatkan Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan

memberikan pembelajaran bermakna tentang dampak kegagalan etika komunikasi terhadap kredibilitas institusional. Dari perspektif *virtue ethics* Aristoteles, kegagalan utama dalam kasus ini ada pada kurangnya *phronesis* (kebijaksanaan praktis) dan keutamaan moral lainnya seperti empati dan sensitivitas kontekstual. Kegagalan ini tidak hanya berimbas pada individu yang terlibat, tetapi juga pada integritas dan kredibilitas institusi secara keseluruhan. Dampak kegagalan komunikasi publik meliputi penurunan kepercayaan publik, kemunduran kredibilitas institusional, dan gangguan terhadap efektivitas kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi publik bukan hanya masalah teknis, melainkan juga masalah moral yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah.

Untuk mencegah terulangnya kegagalan serupa, diperlukan pengembangan *framework* etika komunikasi yang jelas dalam organisasi pemerintahan. *Framework* ini harus mencakup pelatihan etika komunikasi, sistem kontrol dan evaluasi, serta mekanisme untuk memastikan bahwa komunikator publik memiliki pemahaman yang mendalam tentang konteks di mana mereka beroperasi. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pengembangan karakter dan keutamaan moral bagi pejabat publik, khususnya mereka yang bertanggung jawab dalam komunikasi publik. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip *virtue ethics* yang menekankan bahwa tindakan etis muncul dari karakter yang baik dan keutamaan moral yang kuat. Sebagai rekomendasi, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mengembangkan program pelatihan komprehensif tentang etika komunikasi publik, menetapkan standar etika yang jelas untuk komunikator publik, dan menciptakan mekanisme akuntabilitas yang efektif untuk memastikan bahwa komunikasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Andini, R. T., Ainiyah, L., & Setiyadi, B. (2024). Tantangan dan etika komunikasi humas dalam era digital. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(6), 5837–5841. <http://Jiip.stkipyapisdmpu.ac.id>
- Aristoteles. (2009). *The Nicomachean Ethics* (D. Ross, Trans.). Oxford University Press.
- Ayu, R. D. (2025, April 29). *Sederet Kontroversi Hasan Nasbi yang Mundur sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan*. Tempo. https://www.tempo.co/politik/sederet-kontroversi-hasan-nasbi-yang-mundur-sebagai-kepala-kantor-komunikasi-kepresidenan-1284781#goog_rewarded
- Broom, G. M., & Sha, B.-L. (2013). *Effective Public Relations* (11th ed.). Pearson Education Limited.
- Buana, G. (2025, April 29). *5 Fakta Perjalanan Hasan Nasbi Menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Kini Resmi Mundur*. Media Indonesia. https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/765937/5-fakta-perjalanan-hasan-nasbi-menjadi-kepala-kantor-komunikasi-kepresidenan-kini-resmi-mundur#goog_rewarded
- Foot, P. (2001). *Virtues and Vices and Other Essays in Moral Philosophy*. Oxford University Press.
- Grunig, J. E., & Hunt, T. (1984). *Managing Public Relations*. CBS College Publishing.
- Harbowo, N., & Susilo, N. (2025, April 29). *Hasan Nasbi Mundur dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Gerindra Soroti Masalah Komunikasi*. Kompas. <https://www.kompas.id/artikel/hasan-nasbi-mundur-dari-kepala-kantor-komunikasi-presiden-gerindra-soroti-masalah-komunikasi>
- Hatta, M., & Suparman. (2025). Relasi modal sosial dan efektivitas administrasi publik dalam era digitalisasi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 13(2), 254–261. <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium>
- Hursthouse, R., & Pettigrove, G. (2023). *Virtue Ethics*. <https://plato.stanford.edu/entries/ethics-virtue/#toc>

- Kriyantono, R. (2015). *Public Relations Issue dan Crisis Management: Pendekatan Critical Public Relations, Etnografi Kritis, dan Kualitatif*. Kencana Predana Media Group.
- Latifah, I., Wardani, S. A., & Hayat. (2025). Peran etika dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 02(03), 579–587. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jiksp/index>
- Lee, M. (Ed.). (2008). *Government Public Relations: A Reader*. Taylor & Francis Group.
- MacIntyre, A. (2007). *After virtue: a study in moral theory* (3rd ed.). University of Notre Dame Press.
- Musaraj, A., & Gerxhi, J. (2010). Communication and ethical behavior in the public service: From a moral choice toward a legal code. *Academicus: International Scientific Journal*, 1(1), 11–21.
- Prasetyo, K., & Kriswibowo, A. (2022). Public trust pada pemerintah daerah dalam penanganan pandemic covid-19. *Jurnal GOVERNANSI*, 8(1), 25–38.
- Putra, D. K. S. (2024). Power relations between media and politics in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)*, 5(2), 143–152. <https://doi.org/10.15408/jisi.v5i2.41184>
- Rahmawati, B. (2025, April 9). *Kerap memicu Kontroversi, Pemerintah Diminta Memperbaiki Cara Berkomunikasi ke Publik*. Universitas Gadjah Mada. <https://ugm.ac.id/id/berita/kerap-memicu-kontroversi-pemerintah-diminta-memperbaiki-cara-berkomunikasi-ke-publik/>
- Rasyid, H. F. Al, Florencia, S., Zahra, L. A. M., & Manggalou, S. (2025). Implementasi kebijakan pengelolaan komunikasi publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Kecamatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sidoarjo. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(1), 22–29. <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business* (7th ed.). John Wiley & Sons. www.wileypluslearningspace.com
- Sherman, N. (1989). *The Fabric of Character. Aristotle's Theory of Virtue*. Oxford University Press.
- Tench, R., & Yeomans, L. (2009). *Exploring Public Relations* (2nd ed.). Pearson Education Limited. www.pearson-books.com
- Wijayaatmaja, Y. P. (2025, April 29). *Hasan Nasbi Mundur dari Jabatan Juru Bicara Presiden*. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/765929/hasan-nasbi-mundur-dari-jabatan-juru-bicara-presiden>